ZEBMAR
e-ISSN: 3031-6006

Zentrum Economic, Business, Management and Accounting Research

https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/index
Vol. 4 No. 4 Tahun 2026

KONSTRUKTIVISME PRAGMATIS SEBAGAI LANDASAN KONSEPTUAL BAGI PENGEMBANGAN AKUNTANSI ISLAM

Rahmat Aiman[1]

[1]Universitas Negeri Makassar, Indonesia, rahmat.aiman@unm.ac.id

(*Corresponding Author)

PENGUTIPAN:
Aiman, R. (2026). Konstruktivisme Pragmatis sebagai Landasan Konseptual bagi Pengembangan Akuntansi Islam. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, *4*(4), 236-257. https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/article/view/98

Abstrak: Akuntansi Islam memiliki karakteristik yang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga mencakup landasan Syariah, nilai-nilai Islam, dan tanggung jawab moral pelakunya. Karakteristik tersebut memerlukan kerangka konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana realitas akuntansi Islam dibentuk dan dijalankan. Penelitian ini bertujuan menyintesis konstruktivisme pragmatis dan akuntansi Islam melalui empat dimensi pembentukan realitas, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi, serta menganalisis implikasi teoretis dan praktisnya bagi pengembangan akuntansi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengadaptasi kerangka konstruktivisme pragmatis yang disentesiskan dengan akuntansi islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa empat dimensi konstruktivisme pragmatis (fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi) dalam akuntansi Islam memiliki karakteristik saling melengkapi yang membuatnya berbeda dengan akuntansi konvensional. Kerangka ini berbeda dengan pendekatan akuntansi Islam sebelumnya melalui penerapan konstruktivisme pragmatis yang menempatkan doktrin hukum Islam sebagai landasan normatif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengomunikasian realitas praktik akuntansi Islam.Sintesis ini memperluas landasan teoretis akuntansi Islam sekaligus menegaskan pentingnya pengembangan sistem akuntansi yang mengintegrasikan ketentuan Syariah, nilai moral pelaku, dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan.

Kata kunci: Akuntansi Islam, konstruktivisme pragmatis, konstruksi sosial, nilai-nilai Islam, praktik akuntansi.

Abstract: *Islamic accounting is characterized by more than the recording and reporting of transactions, as it also encompasses Sharia principles, Islamic values, and the moral responsibilities of those involved in its practice. These characteristics require a conceptual framework capable of explaining how the reality of Islamic accounting is constructed and enacted. This study aims to synthesize pragmatic constructivism and Islamic accounting through four dimensions of reality formation, namely facts, possibilities, values, and communication, and to examine their theoretical and practical implications for the development of Islamic accounting. This study employs a conceptual approach by adapting the framework of pragmatic constructivism and synthesizing it with Islamic accounting. The synthesis reveals that the four dimensions of pragmatic constructivism (facts, possibilities, values, and communication) possess complementary characteristics in Islamic accounting that distinguish it from conventional accounting. This framework differs from previous approaches to Islamic accounting through its application of pragmatic constructivism, which positions Islamic legal doctrines as the normative foundation for the construction, implementation, and communication of Islamic accounting practices. This synthesis broadens the theoretical foundation of Islamic accounting while emphasizing the importance of*

developing accounting systems that integrate Sharia principles, the moral values of practitioners, and the information needs of stakeholders.

Keywords: *Islamic accounting, pragmatic constructivism, social construction, Islamic values, accounting practices.*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi Islam menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip, nilai, dan tujuan yang mendasari aktivitas tersebut. Keberadaan lembaga keuangan syariah, institusi pengelola zakat dan wakaf, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis akad syariah telah mendorong berkembangnya praktik dan kajian akuntansi Islam (Menne et al., 2023). Perkembangan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang mampu merepresentasikan karakteristik transaksi sekaligus memenuhi tuntutan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip Islam. Akuntansi dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan pertanggungjawaban manusia kepada Allah dan masyarakat, sehingga aktivitas akuntansi tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan dan sosial.

Perhatian terhadap landasan tersebut menjadi penting karena perkembangan akuntansi Islam masih menghadapi persoalan dalam mengintegrasikan identitas keislamannya ke dalam praktik akuntansi kontemporer. Kamla (2009) mengkritisi kecenderungan penelitian dan praktik akuntansi Islam yang masih didominasi orientasi instrumental dan mekanis, serta kecenderungan mengadopsi praktik dan standar akuntansi konvensional tanpa mempertimbangkan secara kritis implikasi sosial dan moralnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif akuntansi Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai moral dengan praktik yang lebih berorientasi pada kepentingan teknis dan ekonomi. Persoalan ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi Islam tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian standar dan prosedur akuntansi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana realitas akuntansi dibentuk, bagaimana praktik dijalankan, dan bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam aktivitas para pelakunya.

Berbagai penelitian telah berupaya mengembangkan landasan konseptual dan praktik akuntansi Islam melalui perspektif yang beragam. Baydoun dan Willett (2000), misalnya, membahas karakteristik pelaporan perusahaan Islam dengan mempertimbangkan kebutuhan pengungkapan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sementara itu, Napier (2009) menguraikan perkembangan historis dan persoalan konseptual dalam mendefinisikan akuntansi Islam, termasuk keberagaman gagasan dan praktik yang tercakup di dalamnya. Kajian yang lebih luas oleh Alshater et al. (2022), melalui tinjauan terhadap penelitian akuntansi Islam periode 1982–2020, mengidentifikasi sejumlah tema utama, antara lain akuntansi zakat, akuntansi wakaf, audit syariah, tata kelola syariah, pembiayaan Islam, pendidikan, dan etika. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian akuntansi Islam telah berkembang dalam

berbagai bidang, tetapi juga menunjukkan luasnya aspek yang perlu diintegrasikan dalam pengembangan pemahaman teoretis akuntansi Islam.

Meskipun demikian, pengembangan akuntansi Islam masih memerlukan kerangka yang mampu menjelaskan keterkaitan antara realitas ekonomi, konstruksi institusional keagamaan, pertimbangan rasional, orientasi nilai, dan komunikasi sosial dalam satu kesatuan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana transaksi syariah diakui, diukur, dan dilaporkan, tetapi juga bagaimana suatu aktivitas memperoleh makna sebagai praktik ekonomi Islam, bagaimana berbagai alternatif perlakuan akuntansi dikembangkan, serta bagaimana nilai-nilai keislaman memengaruhi perilaku para pelakunya (Andrianto et al., 2026).

Salah satu pendekatan yang berpotensi menjelaskan keterkaitan tersebut adalah konstruktivisme pragmatis *(pragmatic constructivism)* yang dikembangkan oleh Nørreklit dan koleganya. Pendekatan ini memandang realitas praktik sebagai hasil konstruksi yang melibatkan hubungan antara manusia dan kondisi dunia yang dihadapinya. Nørreklit et al. (2010) menjelaskan bahwa suatu konstruksi realitas yang dapat berfungsi dalam praktik memerlukan integrasi empat dimensi, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Fakta memberikan landasan empiris bagi tindakan, kemungkinan menyediakan alternatif yang dapat diwujudkan melalui penalaran logis, nilai memberikan orientasi dan motivasi dalam menentukan tindakan, sedangkan komunikasi memungkinkan pemahaman mengenai fakta, kemungkinan, dan nilai dibangun serta digunakan secara bersama. Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi agar konstruksi realitas dapat menjadi dasar bagi tindakan yang efektif. Nørreklit et al. (2016) selanjutnya menegaskan relevansi pendekatan ini dalam menjelaskan praktik akuntansi dan konstruksi realitas yang dilakukan oleh para pelaku organisasi.

Konstruktivisme pragmatis relevan bagi akuntansi Islam karena mengintegrasikan empat dimensi pembentukan realitas. Fakta mencakup objek ekonomi dan ketentuan Syariah; kemungkinan berkaitan dengan pengolahan informasi dan pengembangan sistem akuntansi; nilai menghubungkan prinsip keislaman dengan perilaku pelaku akuntansi (Sunarno, 2024); sedangkan komunikasi memastikan informasi keuangan, kepatuhan Syariah, dan tanggung jawab sosial dipahami oleh pemangku kepentingan. Integrasi tersebut menempatkan akuntansi Islam sebagai praktik yang memadukan aspek empiris, teknis, normatif, dan keislaman.

Penelitian ini bertujuan menyintesiskan konstruktivisme pragmatis dengan akuntansi Islam melalui empat dimensi pembentukan realitas, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis implikasi teoretis dan praktis dari sintesis tersebut terhadap pengembangan akuntansi Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai akuntansi Islam sebagai konstruksi sosial yang memiliki landasan empiris, institusional, normatif, dan motivasional tersendiri. Secara praktis, sintesis ini diharapkan memberikan landasan bagi pengembangan standar, sistem, perilaku, dan komunikasi informasi akuntansi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip dan tujuan Syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Konstrutivisme Pragmatis

Konstruktivisme pragmatis merupakan pendekatan yang memandang realitas sebagai sesuatu yang dibangun melalui interaksi antara pemahaman manusia dan kondisi nyata yang dihadapinya (Nørreklit, 2017). Realitas tidak semata-mata terbentuk dari konstruksi pikiran atau kesepakatan sosial, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan kenyataan yang dapat dikenali dan kemungkinan tindakan yang dapat diwujudkan. Suatu konstruksi dianggap bermakna apabila dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami keadaan dan melakukan tindakan dalam praktik.

Pendekatan ini menjelaskan pembentukan realitas melalui empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Fakta memberikan dasar empiris untuk memahami kenyataan sementara kemungkinan menyediakan alternatif tindakan melalui penalaran logis. Di sini lain nilai memberikan orientasi dan motivasi dalam menentukan pilihan, sedangkan komunikasi memungkinkan pemahaman tersebut dibangun dan diselaraskan menjadi realitas bersama. Keempat dimensi ini menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana manusia membentuk pemahaman, menentukan tindakan, dan membangun realitas dalam kehidupan sosial.

Fakta dan Dimensi Empiris

Fakta merupakan kenyataan yang diamati, dikenali, dan ditetapkan sebagai dasar untuk bertindak. Penetapan fakta tidak berarti manusia menciptakan kenyataan melalui pengamatannya. Kenyataan dapat ada secara independen dari manusia, tetapi perlu diamati dan dikenali agar dapat dipahami sebagai fakta. Fakta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fakta objektif, fakta yang dikonstruksi oleh pelaku sosial, dan fakta subjektif (Hage, 2022).

Fakta objektif merupakan kenyataan yang keberadaannya tidak bergantung pada kesepakatan atau penilaian manusia (Glavå, 2025). Fakta ini mencakup objek, keadaan, dan peristiwa yang dapat diamati, seperti keberadaan suatu bangunan, kondisi fisik tanah, jumlah barang dalam persediaan, atau terjadinya kebakaran. Fakta yang dikonstruksi oleh pelaku sosial merupakan kenyataan yang terbentuk melalui aturan, kesepakatan, interaksi, dan pengakuan bersama dalam kehidupan sosial. Fakta ini memberikan status atau makna tertentu terhadap suatu objek, tindakan, maupun peristiwa yang tidak melekat secara alamiah pada objek tersebut. Sebagai contoh, selembar kertas yang ditetapkan sebagai uang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran karena adanya pengakuan dan kesepakatan sosial; demikian pula seseorang memperoleh status sebagai pemilik suatu aset berdasarkan aturan dan pengakuan hukum (Smit et al., 2011).

Sementara itu, fakta subjektif merupakan kenyataan yang berkaitan dengan persepsi, penilaian, estimasi, dan asumsi individu terhadap suatu keadaan. Fakta subjektif dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, informasi, dan konteks yang melatarbelakangi penilaian seseorang, seperti perkiraan cuaca, penilaian terhadap risiko suatu investasi, atau estimasi umur manfaat sebuah bangunan. Fenomena tersebut tetap dapat dianggap sebagai fakta karena keberadaannya tidak bergantung pada apakah seseorang melaporkan atau mengungkapkannya kepada pihak lain.

Dengan kata lain, suatu gagasan, estimasi, atau rencana tetap ada sebagai fakta dalam kesadaran individu meskipun belum dikomunikasikan atau diwujudkan dalam tindakan.

Ketiga jenis fakta tersebut menunjukkan bahwa dasar empiris suatu tindakan tidak hanya berasal dari kenyataan objektif, tetapi juga mencakup makna yang dibentuk melalui institusi dan penilaian subjektif manusia. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda, tetapi dapat saling berkaitan dalam membentuk pemahaman terhadap realitas. Oleh karena itu, pengenalan fakta memerlukan perhatian terhadap keberadaan objek atau peristiwa, kerangka institusional yang memberinya makna, serta penilaian subjektif yang menyertainya.

Kemungkinan dan Dimensi Logika

Kemungkinan merupakan alternatif tindakan yang dapat diidentifikasi melalui penalaran logis berdasarkan fakta dan kondisi yang ada (Johnson-Laird & Ragni, 2019). Kemungkinan menunjukkan berbagai pilihan yang dapat dipertimbangkan seseorang dalam merespons keadaan yang dihadapi. Kemungkinan tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada fakta yang telah dikenali sebagai dasar penalaran.

Tidak semua kemungkinan yang dapat dibayangkan dapat diwujudkan dalam praktik karena realisasinya dibatasi oleh fakta, sumber daya, dan keadaan yang relevan. Penalaran logis diperlukan untuk membedakan kemungkinan abstrak dari kemungkinan nyata yang dapat dilaksanakan. Melalui proses tersebut, seseorang dapat mengevaluasi berbagai alternatif dan menentukan tindakan yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Nilai dan Dimensi Motivasi

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting atau berharga oleh seseorang dan menjadi alasan mengapa ia memilih tindakan tertentu (Russo-Netzer & Atad, 2024). Nilai menjelaskan mengapa seseorang memilih satu kemungkinan dibandingkan kemungkinan lainnya. Nilai dibedakan menjadi dua, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental(Osberg et al., 2024). Nilai intrinsik merupakan sesuatu yang dianggap berharga pada dirinya sendiri dan menjadi tujuan yang hendak dicapai, sedangkan nilai instrumental merupakan sesuatu yang dianggap berharga karena kegunaannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.

Persoalan muncul ketika nilai instrumental justru menggantikan nilai intrinsik yang seharusnya dilayani. Seorang dosen pada awalnya mengajar agar mahasiswa memahami ilmu, tetapi kemudian lebih mengutamakan gaji dan mengabaikan kualitas pengajaran. Dalam kondisi tersebut, sarana yang semula mendukung tujuan pendidikan justru menjadi tujuan utama. Contoh ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan antara nilai intrinsik sebagai tujuan dan nilai instrumental sebagai sarana untuk mencapainya.

Nilai intrinsik perlu dirumuskan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu praktik karena merepresentasikan tujuan dan aspirasi yang hendak diwujudkan. Agar dapat menjalankan peran tersebut, nilai harus memenuhi tiga persyaratan: (1) dapat diterima oleh masyarakat tempat praktik dijalankan, (2) memperoleh kesepakatan yang kuat di antara para pelakunya, dan (3) dapat diwujudkan melalui fakta dan kemungkinan yang tersedia. Dengan demikian, nilai tidak cukup hanya menjadi cita-cita, tetapi harus dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui pilihan dan kondisi yang memungkinkan.

Komunikasi dan Dimensi Sosial

Komunikasi merupakan proses menyampaikan dan menyelaraskan pemahaman agar fakta, kemungkinan, dan nilai yang dimiliki seseorang dapat dipahami serta digunakan bersama untuk bertindak (Nørreklit, 2020). Komunikasi tidak sekadar memindahkan informasi, tetapi juga memungkinkan individu membangun kesepahaman mengenai kenyataan, alternatif tindakan, dan tujuan yang hendak dicapai.

Tanpa komunikasi, pemahaman mengenai fakta, kemungkinan, dan nilai akan tetap berada pada tingkat individual sehingga sulit membentuk tindakan sosial yang terorganisasi. Melalui komunikasi, pemahaman individual berkembang menjadi realitas intersubjektif, yaitu realitas yang dipahami bersama oleh berbagai individu. Realitas bersama tersebut memungkinkan terbentuknya koordinasi dan tindakan kolektif dalam kehidupan sosial.

Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam proses pembentukan realitas dan tindakan. Fakta menunjukkan keadaan yang dihadapi, kemungkinan menyediakan alternatif tindakan, nilai memberikan alasan untuk memilih tindakan tertentu, sedangkan komunikasi memungkinkan pemahaman dan pilihan tersebut dibagikan serta dikoordinasikan dengan pihak lain (Autioniemi & Jalonen, 2025).

Tinjauan Konseptual dan Empiris Akuntansi Islam

Akuntansi Islam lahir sebagai respons kritis terhadap keterbatasan akuntansi konvensional Barat yang berlandaskan sekularisme, rasionalisme kepentingan pribadi (*self-interest*), dan orientasi maksimalisasi kekayaan pemegang saham (Haniffa & Hudaib, 2002). Sebagai paradigma alternatif, akuntansi Islam bertumpu pada *Shari'ah Islami'iah* yang memadukan prosedur teknis dan nilai moral manusia untuk menegakkan keadilan sosio-ekonomi (*al-'adl wal ihsan*), memenuhi akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat sebagai bentuk ibadah, serta meraih kesejahteraan dunia dan akhirat (*al-falah*) (Haniffa & Hudaib, 2002). Sejalan dengan landasan filosofis tersebut, Alshater et al. (2022) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai proses penyediaan informasi kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan yang sekaligus menjamin komitmen organisasi untuk beroperasi dalam batasan syariah dan mewujudkan tujuan sosio-ekonomi.

Dalam perkembangan literatur akademiknya, kajian akuntansi Islam mengalami lonjakan signifikan sejak tahun 2010 seiring ekspansi lembaga keuangan syariah global dan peran lembaga penyusun standar seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Hassan et al., 2019). Meskipun literatur akuntansi Islam terdahulu masih didominasi pendekatan konseptual dan kualitatif dibandingkan studi perbankan syariah yang lebih empiris (Hassan et al., 2019), pemetaan bibliometrik menunjukkan bahwa struktur intelektual bidang ini telah berkembang ke dalam tujuh aliran riset utama. Ketujuh aliran tersebut meliputi akuntansi wakaf, akuntansi zakat, audit syariah, tata kelola dan penyaringan syariah perusahaan, akuntansi berbagai mode pembiayaan Islam, pendidikan akuntansi, serta etika (Alshater et al., 2022).

Pada tataran teknis dan pelaporan, akuntansi Islam menuntut prinsip pengukuran dan pengungkapan yang berbeda dari praktik konvensional, seperti penghitungan zakat perusahaan berbasis nilai pasar kini serta pengungkapan penuh mengenai transaksi bebas riba, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab lingkungan (Haniffa & Hudaib,

2002). Namun, tinjauan empiris mengungkap adanya pergeseran praktik industri keuangan syariah dari skema bagi hasil (*risk-sharing*) menuju instrumen berbasis utang dan struktur hibrida yang cenderung mengutamakan bentuk legal di atas substansi ekonomi (Hassan et al., 2019). Fenomena ini memicu perdebatan dalam upaya harmonisasi standar pelaporan antara AAOIFI dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), terutama menyangkut isu substansi mengungguli bentuk (*substance over form*), nilai waktu uang, serta perlakuan akuntansi pada akad *murabahah*, *ijarah*, dan *sukuk* (Hassan et al., 2019).

Sintesis dari ketiga kajian tersebut menegaskan bahwa agenda utama pengembangan akuntansi Islam ke depan adalah menjembatani kesenjangan antara kerangka normatif syariah dan realitas implementasi empiris di berbagai yurisdiksi (Haniffa & Hudaib, 2002). Riset selanjutnya perlu memperluas pengujian empiris pada isu-isu krusial seperti standarisasi penghitungan zakat, model valuasi dan pelaporan aset wakaf, efektivitas audit internal syariah, serta pengaruh komitmen etika dan norma religius terhadap kualitas laporan keuangan (Alshater et al., 2022; Hassan et al., 2019). Di samping itu, reformasi kurikulum pendidikan akuntansi berbasis nilai-nilai Islam dan penegakan regulasi pengungkapan menjadi prasyarat penting agar akuntansi Islam tidak sekadar menjadi adaptasi teknis dari standar Barat, melainkan instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan berkeadilan (Alshater et al., 2022)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang bertujuan mengembangkan pemahaman teoretis mengenai akuntansi Islam melalui kerangka konstruktivisme pragmatis. Desain penelitian mengacu pada Nørreklit et al. (2010), yang menggunakan argumentasi konseptual untuk menjelaskan konstruktivisme pragmatis dan relevansinya sebagai landasan dalam memahami praktik akuntansi. Mengikuti pendekatan tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel atau mengukur fenomena secara empiris, tetapi untuk membangun sintesis konseptual antara konstruktivisme pragmatis dan akuntansi Islam.

Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi sumber dalam menjelaskan landasan teoretis konstruktivisme pragmatis dan karakteristik konseptual akuntansi Islam. Literatur konstruktivisme pragmatis terutama merujuk pada karya Nørreklit et al. (2010) sebagai landasan utama untuk memahami empat dimensi pembentukan realitas, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Sementara itu, literatur akuntansi Islam mencakup artikel ilmiah, buku akademik, serta dokumen standar dan ketentuan Syariah yang relevan dengan landasan, prinsip, dan praktik akuntansi Islam. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi substantif terhadap fokus penelitian, kejelasan landasan konseptual, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara prinsip Syariah dan praktik akuntansi.

Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji gagasan utama konstruktivisme pragmatis dan konsep-konsep akuntansi Islam yang relevan. Kajian terhadap konstruktivisme pragmatis difokuskan pada empat dimensi pembentukan realitas, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Sementara itu, kajian akuntansi Islam diarahkan untuk memahami karakteristik realitas ekonomi, konstruksi institusional yang

berlandaskan ketentuan Syariah, orientasi nilai dalam praktik akuntansi, serta kebutuhan komunikasi informasi kepada para pemangku kepentingan. Kedua bidang kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan argumentasi mengenai hubungan konstruktivisme pragmatis dengan karakteristik akuntansi Islam.

Hasil sintesis tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan akuntansi Islam. Implikasi teoretis diarahkan pada pengembangan pemahaman akuntansi Islam sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi dengan tetap berlandaskan prinsip Syariah. Sementara itu, implikasi praktis diarahkan pada konsekuensi kerangka tersebut terhadap pengembangan landasan institusional, sistem dan praktik akuntansi, perilaku pelaku akuntansi, serta penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fakta Objektif dalam Akuntansi Islam

Fakta objektif dalam akuntansi Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dari fakta objektif dalam akuntansi konvensional, karena keduanya berkaitan dengan keberadaan fisik suatu objek dan kejadian ekonomi yang dapat diamati serta diverifikasi. Fakta objektif tersebut meliputi aset berwujud, seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan, persediaan barang dagangan, bahan baku, dan produk jadi; sumber daya keuangan, seperti kas di tangan dan uang yang secara fisik diterima atau dibayarkan. Fakta objektif juga mencakup peristiwa yang dapat diamati, seperti kerusakan mesin, kehilangan persediaan, kebakaran gedung, dan penyerahan barang kepada pelanggan. Keberadaan objek dan terjadinya peristiwa tersebut tidak berubah hanya karena entitas menerapkan prinsip akuntansi Islam atau konvensional. Perbedaan keduanya terutama terletak pada bagaimana fakta tersebut diakui, diukur, diklasifikasikan, dan dilaporkan berdasarkan ketentuan akuntansi serta prinsip yang mendasari praktik masing-masing.

Fakta Hasil Konstruksi Sosial dalam Akuntansi Islam

Fakta hasil konstruksi sosial dalam akuntansi Islam merupakan jenis fakta yang mulai membedakannya dari akuntansi konvensional. Berbeda dengan fakta objektif yang keberadaannya dapat diamati secara fisik, fakta hasil konstruksi sosial eksis karena manusia membentuk, mengakui, dan mempertahankan makna serta aturan tertentu secara bersama-sama. Dalam akuntansi Islam, fakta yang dikonstruksi secara sosial-keagamaan antara lain zakat dan turunannya, seperti zakat fitrah, zakat mal, nisab, haul, dan mustahik; akad dan turunannya, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna; wakaf dan turunannya, seperti wakaf uang, wakaf tanah, nazhir, dan hasil pengelolaan wakaf; serta infak dan turunannya, seperti penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana infak.

Fakta-fakta tersebut termasuk konstruksi sosial karena keberadaannya sebagai konsep tidak semata-mata ditentukan oleh objek fisik, melainkan oleh pengakuan bersama terhadap aturan, makna, dan status yang melekat padanya. Sebagai contoh, uang secara fisik tetap merupakan uang, tetapi pengakuannya sebagai zakat bergantung pada ketentuan mengenai kewajiban zakat, harta yang menjadi objek zakat, serta pihak yang berhak menerimanya (Alam, 2022). Demikian pula, penyerahan uang atau barang

tidak dengan sendirinya merupakan transaksi murabahah atau wakaf karena status tersebut bergantung pada ketentuan dan pengakuan terhadap akad atau institusi yang bersangkutan.

Konstruksi sosial dalam akuntansi Islam memiliki landasan yang berbeda dari konstruksi sosial dalam akuntansi konvensional (Aziz & Ahmad, 2018). Konstruksi tersebut tidak semata-mata terbentuk melalui kesepakatan antarmanusia, tetapi berlandaskan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, dan pengembangan pemikiran hukum Islam. Doktrin tersebut menjadi dasar untuk memahami dan membentuk konsep-konsep institusional, seperti zakat, akad, wakaf, dan infak beserta turunannya. Konstruksi sosial dalam akuntansi Islam merupakan proses penerjemahan doktrin hukum Islam ke dalam konsep dan praktik ekonomi yang kemudian diakui dan diterapkan bersama. Artinya, konstruksi tersebut melibatkan penafsiran dan kesepakatan manusia, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena tetap terikat pada landasan normatif keagamaan.

Keberadaan zakat, akad syariah, wakaf, dan infak sebagai institusi keagamaan beserta konsekuensi akuntansinya bergantung pada penerimaan dan penerapan kerangka sosial-keagamaan Islam (Mahyudin et al., 2025). Apabila kerangka tersebut tidak diakui, objek fisik dan transaksi ekonominya mungkin tetap ada, tetapi statusnya sebagai zakat, akad syariah, wakaf, atau infak tidak terbentuk dalam pengertian institusional Islam. Inilah yang menjadikan realitas akuntansi Islam memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam akuntansi konvensional.

Fakta Subjektif dalam Akuntansi Islam

Fakta subjektif dalam akuntansi Islam berkaitan dengan estimasi, perkiraan, dan asumsi mengenai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya dapat diketahui atau dipastikan pada saat pengukuran dilakukan. Fakta subjektif tersebut antara lain estimasi penerimaan zakat pada periode mendatang, estimasi keuntungan usaha berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah, estimasi umur manfaat aset wakaf, estimasi penerimaan infak dan sedekah, atau estimasi kerugian pembiayaan yang berpotensi tidak tertagih. Estimasi tersebut diperlukan karena praktik akuntansi Islam tidak hanya berhubungan dengan objek dan transaksi yang telah terjadi, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemungkinan kondisi ekonomi pada masa mendatang.

Fakta subjektif tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan fakta objektif dan fakta hasil konstruksi sosial. Sebagai contoh, estimasi penerimaan zakat didasarkan pada fakta objektif berupa jumlah muzakki, nilai kekayaan, dan penerimaan zakat pada periode sebelumnya, serta fakta institusional berupa ketentuan mengenai objek zakat, nisab, haul, dan tarif zakat (Obaidullah, 2016). Demikian pula, estimasi keuntungan usaha didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dapat diamati dan karakteristik akad yang digunakan, sedangkan estimasi umur manfaat aset wakaf mempertimbangkan kondisi fisik aset, pola pemanfaatan, dan karakteristik pengelolaan wakaf. Fakta subjektif merupakan hasil penilaian terhadap fakta objektif dan fakta institusional dengan mempertimbangkan kondisi serta kemungkinan yang berkembang dalam praktik ekonomi.

Karakteristik utama fakta subjektif adalah sifatnya yang kontekstual dan tidak selalu menghasilkan estimasi yang sama untuk setiap entitas atau situasi. Tidak terdapat

satu angka estimasi yang berlaku secara universal untuk seluruh kondisi karena hasil estimasi bergantung pada karakteristik objek, kondisi ekonomi, pengalaman historis, lingkungan operasional, metode penilaian, serta waktu dilakukannya estimasi. Estimasi umur manfaat gedung wakaf dapat berbeda antara gedung yang terawat dengan baik dan gedung yang mengalami kerusakan akibat kondisi lingkungan. Begitu pula estimasi kerugian pembiayaan dapat berbeda antara nasabah yang memiliki riwayat pembayaran lancar dan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan (Shafii & Abdul Rahman, 2016).

Kemungkinan dan Dimensi Rasional dalam Akuntansi Islam

Kemungkinan dalam konteks akuntansi islam merujuk pada berbagai alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses, metode, dan sistem akuntansi agar mampu merepresentasikan aktivitas ekonomi sesuai dengan fakta objektif, fakta hasil konstruksi sosial-keagamaan, dan fakta subjektif. Dengan demikian, kemungkinan dalam akuntansi Islam tidak berangkat dari ruang kosong atau sekadar imajinasi manusia, tetapi dibangun berdasarkan ketiga jenis fakta tersebut. Fakta objektif menyediakan informasi mengenai objek dan kejadian ekonomi yang nyata, fakta hasil konstruksi sosial-keagamaan memberikan landasan normatif dan institusional berdasarkan prinsip Islam, sedangkan fakta subjektif menyediakan estimasi dan pertimbangan kontekstual mengenai kondisi ekonomi. Ketiganya menjadi dasar bagi manusia untuk mengembangkan berbagai alternatif penyelesaian masalah akuntansi.

Dalam praktiknya, kemungkinan dan dimensi rasional dalam akuntansi Islam dapat dijelaskan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. **Pemrosesan Data dalam Akuntansi Islam**
   Tahap pertama berkaitan dengan berbagai alternatif pendekatan dalam memproses data akuntansi, mulai dari identifikasi, pengakuan, hingga pengukuran transaksi dan peristiwa ekonomi. Dalam akuntansi Islam, proses ini harus mempertimbangkan keberadaan objek dan kejadian ekonomi, karakteristik transaksi berdasarkan akad yang digunakan, serta ketentuan syariah yang relevan. Sebagai contoh, terdapat berbagai kemungkinan pendekatan dalam mengidentifikasi dan mengakui transaksi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah karena masing-masing memiliki karakteristik ekonomi dan konsekuensi akuntansi yang berbeda (Ahmed et al., 2016). Demikian pula, pengukuran zakat, aset wakaf, dan dana infak memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing (Moussa & Yilmaz, 2025). Berbagai alternatif tersebut memungkinkan akuntan mengembangkan metode pemrosesan data yang mampu merepresentasikan substansi transaksi sekaligus mempertimbangkan ketentuan syariah.
2. **Penggabungan Informasi Akuntansi Islam**
   Tahap kedua berkaitan dengan berbagai alternatif dalam menggabungkan dan mengolah informasi akuntansi agar menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan. Informasi akuntansi Islam tidak hanya berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, tetapi juga dapat mencakup informasi mengenai kepatuhan syariah, pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, terdapat berbagai kemungkinan dalam mengelompokkan, mengintegrasikan, dan

menyajikan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna (Abojeib et al., 2023). Lembaga keuangan syariah dapat menggabungkan informasi mengenai pembiayaan berdasarkan jenis akad, tingkat keuntungan, kualitas pembiayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga pengelola zakat juga dapat mengintegrasikan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, penyaluran, dan distribusi dana kepada para mustahik. Penggabungan tersebut bertujuan menghasilkan informasi yang lebih bermakna bagi stakeholders dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, dan pertanggungjawaban entitas berdasarkan prinsip Islam.

3. **Perancangan Sistem dan Sistem Informasi Akuntansi Islam**

   Tahap ketiga berkaitan dengan berbagai alternatif dalam merancang sistem dan struktur akuntansi, termasuk sistem informasi dan pelaporan keuangan, agar informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para stakeholders. Dalam konteks akuntansi Islam, perancangan sistem tidak hanya mempertimbangkan efisiensi pencatatan dan penyajian informasi keuangan, tetapi juga harus mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah memerlukan sistem informasi yang mampu membedakan pencatatan transaksi berdasarkan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Demikian pula, lembaga pengelola zakat dan wakaf memerlukan struktur sistem informasi yang memungkinkan pemisahan, pemantauan, dan pelaporan dana berdasarkan sumber, peruntukan, serta penerima manfaatnya (Kamaruddin et al., 2022). Berbagai alternatif perancangan sistem tersebut dapat dikembangkan agar informasi akuntansi Islam tersaji secara transparan, dapat dipahami, dan mendukung pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Kemungkinan dalam akuntansi Islam merupakan ruang bagi pengembangan berbagai alternatif pendekatan, metode, dan sistem untuk merepresentasikan serta mengomunikasikan realitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Dimensi rasional muncul ketika manusia mempertimbangkan berbagai alternatif tersebut, menilai konsekuensinya, dan menentukan pilihan yang paling sesuai dengan fakta, tujuan, kebutuhan informasi, serta ketentuan syariah.

Nilai dan Motivasi dalam Akuntansi Islam

Dimensi nilai dan motivasi merupakan aspek yang sangat penting dalam akuntansi Islam karena menentukan tujuan, arah, dan alasan mengapa praktik akuntansi dilaksanakan. Akuntansi Islam tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi keuangan yang akurat dan berguna, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi dan perilaku para pelakunya (Caniago et al., 2023). Pada dimensi ini, nilai dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan memiliki kedudukan utama dalam praktik akuntansi Islam. Nilai ini berlandaskan ajaran Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah (Wahyuni et al., 2018). Sementara itu, nilai instrumental merupakan sarana yang digunakan untuk mewujudkan atau mendukung pencapaian nilai intrinsik. Contohnya meliputi standar akuntansi, sistem pengendalian internal, audit, teknologi

informasi, dan prosedur pelaporan. Dengan demikian, standar akuntansi dan berbagai perangkat teknis lainnya bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dapat dijalankan secara jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Nilai intrinsik menjadi tujuan utama, sedangkan nilai instrumental berfungsi sebagai sarana untuk mencapainya.

Dalam akuntansi Islam, landasan nilai dan motivasi dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya saling melengkapi, tetapi memiliki orientasi yang berbeda.

Tabel 1. Islam, Iman, dan Ihsan sebagai Dimensi Nilai dan Motivasi dalam Akuntansi Islam

Dimensi	**Orientasi utama**	**Hubungan dengan nilai dan motivasi dalam akuntansi**
Islam (syariah)	Ketundukan melalui aturan dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan Allah.	Menentukan batas tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk kehalalan transaksi, akad, sumber dana, dan praktik pengelolaan keuangan.
Iman	Keyakinan terhadap Allah dan pertanggungjawaban manusia kepada-Nya.	Menjadi landasan internal bagi pelaku akuntansi untuk menjalankan tanggung jawab, kejujuran, amanah, dan integritas, termasuk ketika tidak diawasi manusia.
Ihsan	Kesadaran untuk beribadah kepada Allah seolah-olah melihat-Nya, dan jika tidak mampu, menyadari bahwa Allah melihatnya.	Mendorong pelaku akuntansi bekerja dengan sungguh-sungguh, cermat, bertanggung jawab, dan menjaga kualitas pekerjaannya karena merasa selalu berada dalam pengawasan Allah.

Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang berbeda dengan objek dan pelaku akuntansi. Aspek Islam terutama mengatur aspek transaksi dan aktivitas ekonomi yang menjadi objek akuntansi, yaitu menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan syariah. Ketentuan ini mencakup kehalalan sumber dana, penggunaan akad, aktivitas usaha, serta pengelolaan keuangan. Transaksi yang mengandung riba, gharar yang dilarang, dan maysir tidak dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan keuntungan secara ekonomi.

Sementara itu, iman dan ihsan terutama berkaitan dengan dimensi batiniah, motivasi, dan perilaku orang yang menjalankan praktik akuntansi. Iman membangun keyakinan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi pertanggungjawaban kepada Allah (Edgina & Hamid, 2025). Keyakinan tersebut menjadi motivasi internal bagi akuntan untuk menjaga kejujuran, amanah, integritas, dan tanggung jawab, bahkan ketika tidak terdapat pengawasan dari pihak lain. Ihsan kemudian mendorong kualitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut melalui kesadaran spiritual bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia (Nursanty et al., 2025). Kesadaran ini

mendorong akuntan untuk bekerja secara optimal, teliti, cermat, dan tidak sekadar memenuhi standar minimum yang diwajibkan oleh profesi.

Komunikasi dan Akuntansi Islam (dimensi sosial-agama)

Komunikasi dalam akuntansi Islam merupakan proses menyampaikan informasi yang dihasilkan dari penerapan fakta, kemungkinan, dan nilai-nilai Islam agar dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan serta menjalankan tanggung jawabnya. Komunikasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian hasil keuangan, tetapi juga pada pengungkapan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip Syariah dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (Maali et al., 2006).

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, akuntan dalam konteks akuntansi Islam perlu memperhatikan empat aspek berikut.

1. Pihak yang menggunakan informasi.

Komunikasi akuntansi Islam tidak terbatas pada investor dan kreditor sebagai pengguna informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Informasi juga perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kepatuhan Syariah dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Pihak tersebut meliputi pemilik dana, nasabah, karyawan, regulator, pengawas Syariah, penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta masyarakat. Setiap pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, akuntan perlu mempertimbangkan siapa pengguna informasi dan jenis informasi yang dibutuhkan agar komunikasi dapat mendukung pengambilan keputusan sekaligus pertanggungjawaban perusahaan (Salleh et al., 2017).

2. Muatan informasi yang dikomunikasikan.

Informasi dalam akuntansi Islam meliputi posisi keuangan, kinerja, arus kas, serta informasi lain yang diperlukan untuk menilai kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip Syariah serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (Mukhibad et al., 2022). Muatan informasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagian berikut.

1. Informasi keuangan. Perusahaan melaporkan aset, kewajiban, pendapatan, beban, arus kas, dan informasi keuangan lainnya yang diperlukan pengguna laporan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi tersebut juga perlu mencerminkan substansi transaksi, jenis akad yang mendasari aktivitas ekonomi, serta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan Syariah.
2. Informasi zakat dan kepatuhan Syariah. Perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai status halal atau haram dari kegiatan usaha dan sumber pendapatan, jenis akad yang digunakan, serta kepatuhan terhadap ketentuan Syariah. Informasi ini juga mencakup kewajiban dan perhitungan zakat, serta pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf apabila relevan dengan aktivitas entitas. Selain itu, informasi mengenai penggunaan dana, distribusi hasil usaha, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana dapat disampaikan untuk membantu pengguna menilai bagaimana aktivitas ekonomi dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Informasi tentang karyawan. Perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai pemenuhan hak karyawan, remunerasi, kondisi dan keselamatan kerja, kesempatan pengembangan, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Informasi tersebut membantu pengguna menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewajibannya terhadap karyawan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam Islam.
4. Informasi sosial dan lingkungan. Perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai dampak aktivitas usaha terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk kontribusi sosial, pemberdayaan masyarakat, penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, serta upaya mengurangi dampak lingkungan. Pengungkapan ini membantu pengguna menilai apakah kegiatan ekonomi perusahaan telah memperhatikan kemaslahatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Penyajian informasi.

Informasi akuntansi Islam perlu disajikan secara jelas, relevan, dapat dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memperhatikan ketepatan angka dan kesesuaian dengan standar akuntansi, penyajian informasi juga memastikan bahwa substansi transaksi dan penerapan prinsip Syariah dapat dipahami oleh pengguna. Informasi keuangan, kepatuhan Syariah, pemenuhan hak karyawan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu disajikan secara memadai sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna (Amran et al., 2017). Pengungkapan juga perlu menjelaskan kebijakan, dasar pengukuran, dan pertimbangan yang digunakan agar pengguna dapat memahami informasi yang disampaikan secara utuh. Penyajian informasi merupakan sarana untuk mengomunikasikan realitas ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara transparan.

4. Membangun Pemahaman Bersama

Komunikasi akuntansi Islam bertujuan membangun pemahaman bersama antara penyusun laporan dan berbagai pihak yang menggunakan informasi. Pemahaman tersebut terbentuk ketika informasi yang disajikan dapat ditafsirkan secara tepat sesuai dengan konteks dan kepentingan masing-masing pihak. Sebagai contoh, informasi mengenai akad mudharabah perlu memungkinkan pemilik dana memahami dasar pembagian hasil usaha, sedangkan informasi zakat perlu membantu pihak yang berkepentingan memahami dasar perhitungan, jumlah kewajiban, dan penyalurannya. Demikian pula, informasi tentang karyawan dan dampak lingkungan perlu memungkinkan pengguna menilai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak tersebut (Salleh et al., 2017). Proses membangun pemahaman bersama juga memerlukan dialog, penjelasan, dan mekanisme pertanggungjawaban agar perbedaan penafsiran dapat diklarifikasi dan kesepahaman dapat dibentuk.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam akuntansi Islam bukan sekadar proses menyampaikan laporan keuangan, melainkan proses membangun pemahaman sosial mengenai aktivitas ekonomi, kepatuhan Syariah, dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari fakta, kemungkinan, dan nilai-nilai Islam dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan melalui muatan dan

penyajian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika informasi tersebut dipahami bersama, komunikasi memungkinkan berbagai pihak menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, komunikasi berperan menghubungkan realitas akuntansi yang dibangun dalam suatu entitas dengan realitas sosial yang dipahami dan digunakan oleh para pemangku kepentingan.

Integrasi Fakta, Kemungkinan, Nilai, dan Komunikasi sebagai Landasan Akuntansi Islam

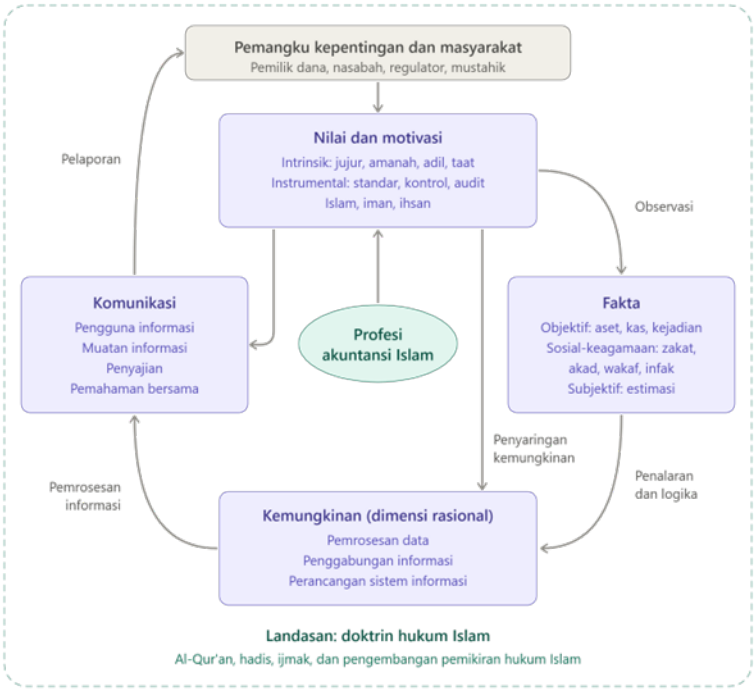

Gambar 1. Proses Integrasi Konstruktivisme Pragmatis dalam Akuntansi Islam

Gambar 1 menunjukkan bahwa fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu siklus yang saling terhubung dan berulang. Siklus ini berpusat pada profesi akuntansi Islam, yaitu pihak yang menjalankan praktik akuntansi, dan berinteraksi dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Seluruh siklus berada dalam bingkai doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan pengembangan pemikiran hukum Islam. Bingkai ini menegaskan bahwa konstruksi akuntansi Islam melibatkan penafsiran dan kesepakatan manusia, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena tetap terikat pada landasan normatif keagamaan.

Siklus dapat dibaca mulai dari masyarakat dan pemangku kepentingan, seperti pemilik dana, nasabah, regulator, dan mustahik, yang membawa kebutuhan serta harapan terhadap praktik akuntansi. Kebutuhan ini diterima oleh dimensi nilai dan motivasi, yang terdiri atas nilai intrinsik (kejujuran, amanah, keadilan, dan ketaatan kepada Allah) dan nilai instrumental (standar akuntansi, pengendalian internal, dan audit), dengan Islam, iman, dan ihsan sebagai landasannya. Nilai intrinsik menjadi tujuan utama, sedangkan nilai instrumental menjadi sarana untuk mencapainya. Dimensi

ini menentukan arah dan alasan praktik akuntansi dijalankan, sehingga menjadi penuntun bagi seluruh tahap berikutnya. Karena itu, profesi akuntansi Islam di pusat diagram dihubungkan langsung dengan dimensi nilai, dan dari dimensi inilah tiga panah keluar menuju fakta, kemungkinan, dan komunikasi.

Dari nilai, proses bergerak menuju fakta melalui observasi. Nilai memengaruhi fakta apa yang diamati dan diperhatikan oleh akuntan. Fakta tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, fakta objektif, yaitu aset, kas, dan kejadian ekonomi yang dapat diamati dan diverifikasi. Kedua, fakta hasil konstruksi sosial-keagamaan, seperti zakat, akad, wakaf, dan infak, yang keberadaannya bergantung pada pengakuan terhadap kerangka sosial-keagamaan Islam. Ketiga, fakta subjektif berupa estimasi atas kondisi ekonomi yang belum dapat dipastikan. Ketiganya saling berkaitan karena estimasi disusun dari fakta objektif dan fakta institusional.

Fakta kemudian diolah menjadi kemungkinan melalui penalaran dan logika. Kemungkinan tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan dibangun di atas ketiga jenis fakta tersebut. Pada tahap ini terdapat banyak alternatif pendekatan untuk memproses data, menggabungkan informasi, dan merancang sistem informasi akuntansi. Namun, tidak semua alternatif layak diteruskan. Dimensi nilai dan motivasi turut memengaruhi dimensi kemungkinan secara langsung melalui proses penyaringan, sehingga hanya alternatif yang sesuai dengan fakta sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam yang diproses lebih lanjut. Di sinilah dimensi rasional bekerja, yaitu ketika manusia mempertimbangkan berbagai alternatif, menilai konsekuensinya, dan memilih yang paling sesuai dengan fakta, tujuan, kebutuhan informasi, dan ketentuan

syariah.Kemungkinan yang telah tersaring diteruskan ke dimensi komunikasi melalui pemrosesan informasi. Nilai juga memengaruhi dimensi ini secara langsung, yaitu dalam menentukan pengguna informasi, muatan yang perlu diungkapkan, cara penyajian, dan upaya membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, komunikasi tidak sekadar menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga mengungkapkan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip Syariah dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Hasilnya disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaporan.

Dengan penyampaian tersebut, siklus kembali ke titik awalnya. Tanggapan, penilaian, dan kebutuhan baru dari pemangku kepentingan menjadi masukan bagi dimensi nilai pada putaran berikutnya, sehingga praktik akuntansi Islam terus berkembang. Alur ini menunjukkan bahwa komunikasi berperan menghubungkan realitas akuntansi yang dibangun dalam suatu entitas dengan realitas sosial yang dipahami dan digunakan oleh para pemangku kepentingan.

Implikasi Teoritis

Pembahasan mengenai konstruktivisme pragmatis dalam akuntansi Islam memberikan tiga implikasi teoretis utama. Pertama, akuntansi Islam perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang memiliki landasan pembentuk realitasnya sendiri. Kedua, cakupan akuntansi Islam tidak cukup dibatasi pada pengaturan praktik dan prosedur akuntansi, tetapi juga perlu mencakup aspek manusia yang menjalankan praktik

tersebut. Ketiga, kualitas akuntansi Islam ditentukan oleh koherensi antara fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi (Nørreklit et al., 2016).

Jika akuntansi dipahami sebagai konstruksi sosial, akuntansi tidak dapat dipandang sebagai praktik teknis yang sepenuhnya netral atau sekadar mencerminkan realitas ekonomi yang telah tersedia. Praktik akuntansi terbentuk melalui seperangkat fakta, aturan, kesepakatan, nilai, dan tujuan yang memberikan makna terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi Islam memiliki dasar konstruksi yang berbeda dari akuntansi konvensional karena realitas yang dibentuk tidak hanya bersumber dari fakta ekonomi dan kesepakatan institusional, tetapi juga dari ajaran dan ketentuan Syariah (Baydoun & Willett, 2000).

Perbedaan konstruksi tersebut mulai terlihat pada fakta institusional, terutama dalam pengakuan terhadap zakat, akad, wakaf, infak, dan sedekah sebagai realitas yang memiliki karakteristik serta konsekuensi akuntansi tersendiri. Perbedaan itu semakin mendasar pada dimensi nilai dan motivasi. Akuntansi Islam tidak hanya menentukan bagaimana suatu transaksi diakui, diukur, dan dilaporkan, tetapi juga menempatkan kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah sebagai landasan yang mengarahkan praktik akuntansi (Maali et al., 2006). Dengan demikian, konstruksi akuntansi Islam bukan sekadar variasi teknis dari akuntansi konvensional, melainkan konstruksi yang memiliki dasar institusional, normatif, dan motivasional tersendiri.

Pemahaman akuntansi Islam sebagai konstruksi sosial tersebut membawa konsekuensi terhadap cakupan teoretis akuntansi Islam. Apabila realitas akuntansi dibentuk melalui fakta, aturan, nilai, dan tujuan tertentu, perhatian teoretis tidak dapat berhenti pada standar dan prosedur yang mengatur praktik akuntansi. Perhatian tersebut juga perlu mencakup manusia yang merancang, menjalankan, mengawasi, dan menggunakan informasi akuntansi karena kualitas praktik akuntansi turut dipengaruhi oleh keyakinan, motivasi, dan kesadaran moral para pelakunya.

Gagasan ini tercermin dalam konsep Islam, iman, dan ihsan yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Islam memberikan landasan normatif untuk mengatur objek dan praktik akuntansi, seperti ketentuan mengenai transaksi yang diperbolehkan, larangan riba, serta karakteristik akad. Sementara itu, iman dan ihsan memberikan landasan bagi pelaku akuntansi melalui keyakinan terhadap pertanggungjawaban kepada Allah dan kesadaran bahwa setiap tindakan berada dalam pengawasan-Nya. Iman mendorong pelaku untuk bertindak berdasarkan keyakinan dan tanggung jawab moral, sedangkan ihsan mendorong mereka melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, teliti, dan berkualitas, bahkan ketika tidak terdapat pengawasan langsung Basri et al., 2016).

Dengan demikian, akuntansi Islam memiliki dua wilayah perhatian yang saling berkaitan, yaitu pengaturan terhadap praktik akuntansi dan pembentukan orientasi moral pelaku akuntansi. Standar dan prosedur diperlukan untuk memastikan praktik berjalan sesuai ketentuan Syariah, sedangkan iman dan ihsan membentuk kesadaran internal agar pelaku menjalankan praktik tersebut dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Implikasi ini memperluas landasan teoretis akuntansi Islam dari pendekatan yang berpusat pada kepatuhan terhadap aturan menuju pendekatan yang

juga mempertimbangkan kualitas moral dan motivasi manusia yang menjalankannya (Basri et al., 2016).

Perluasan perhatian terhadap praktik dan pelaku akuntansi tersebut selanjutnya menegaskan pentingnya hubungan antardimensi dalam konstruktivisme pragmatis. Keempat dimensi menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pencatatan atau kepatuhan terhadap standar. Kualitas praktik juga bergantung pada kesesuaian antara fakta yang direpresentasikan, alternatif perlakuan akuntansi yang dipilih, nilai yang mendasari keputusan, dan informasi yang dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Dalam akuntansi Islam, keempat dimensi tersebut perlu membentuk kesatuan agar praktik akuntansi tidak hanya menggambarkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketentuan dan tujuan Syariah (Nørreklit et al., 2016).

Sebagai contoh, suatu entitas dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku dan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, tetapi belum tentu merepresentasikan substansi akad secara tepat. Entitas juga dapat memenuhi ketentuan formal Syariah, tetapi belum tentu menunjukkan nilai amanah apabila informasi mengenai pengelolaan dana tidak disampaikan secara transparan. Demikian pula, informasi yang lengkap belum tentu menghasilkan pertanggungjawaban apabila tidak dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kontribusi teoretis ini terletak pada penempatan koherensi keempat dimensi sebagai dasar untuk memahami kualitas praktik akuntansi Islam secara menyeluruh.

Implikasi Praktis

Hasil sintesis ini memberikan beberapa implikasi bagi pengembangan dan pelaksanaan praktik akuntansi Islam. Salah satunya berkaitan dengan penguatan landasan institusional dalam praktik akuntansi Islam. Fakta-fakta yang dikonstruksi berdasarkan ketentuan Syariah, seperti zakat, akad, wakaf, infak, dan sedekah, perlu memperoleh pengakuan dan pemahaman bersama agar dapat menjadi landasan bagi seluruh pelaku akuntansi Islam. Kesamaan landasan tersebut penting untuk menjaga konsistensi dalam memahami dan merepresentasikan berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Syariah. Selain itu, pengembangan standar akuntansi Islam perlu memperluas cakupan pengaturannya, tidak hanya mencakup aspek teknis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, tetapi juga memperhatikan perilaku pelaku akuntansi. Dalam hal ini, Islam memberikan landasan normatif bagi praktik akuntansi, sedangkan iman dan ihsan memberikan landasan moral bagi perilaku pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mendorong penerapan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, ketelitian, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas akuntansi (Wahyuni et al., 2021).

Implikasi lainnya berkaitan dengan pengembangan model komunikasi informasi akuntansi yang lebih luas. Praktik akuntansi Islam perlu mempertimbangkan kebutuhan informasi berbagai pihak, tidak hanya investor dan kreditor, tetapi juga nasabah, karyawan, regulator dan pengawas Syariah, penerima dana sosial, serta masyarakat. Perluasan orientasi komunikasi tersebut berimplikasi pada muatan informasi yang disampaikan. Informasi akuntansi tidak cukup hanya menggambarkan posisi keuangan dan kinerja entitas, tetapi juga perlu mencakup kepatuhan Syariah, karakteristik akad,

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta tanggung jawab sosial entitas (Abdulrahman et al., 2024. Dengan demikian, komunikasi akuntansi dapat mendukung pemenuhan kebutuhan informasi dan pertanggungjawaban entitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menyintesiskan konstruktivisme pragmatis dengan akuntansi Islam serta menganalisis implikasi teoretis dan praktis dari sintesis tersebut terhadap pengembangan akuntansi Islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa konstruktivisme pragmatis melalui empat dimensi, yaitu fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi, dapat memberikan kerangka untuk memahami pembentukan realitas akuntansi Islam secara lebih menyeluruh. Realitas tersebut dibentuk melalui keberadaan fakta objektif, fakta institusional yang berlandaskan ketentuan Syariah, dan fakta subjektif yang berkaitan dengan estimasi serta pertimbangan pelaku akuntansi. Ketiga jenis fakta tersebut menjadi dasar bagi pengembangan alternatif metode dan sistem akuntansi, sedangkan nilai-nilai Islam memberikan orientasi normatif dan motivasional bagi praktik serta perilaku pelakunya. Selanjutnya, komunikasi memungkinkan informasi mengenai aktivitas ekonomi, kepatuhan Syariah, dan tanggung jawab sosial dipahami serta digunakan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.

Secara teoretis, sintesis ini memperluas pemahaman akuntansi Islam sebagai konstruksi sosial yang memiliki landasan empiris, institusional, normatif, dan motivasional tersendiri. Akuntansi Islam tidak hanya berkaitan dengan pengaturan praktik dan prosedur akuntansi, tetapi juga mencakup manusia yang merancang, menjalankan, mengawasi, dan menggunakan informasi akuntansi. Kualitas praktiknya bergantung pada koherensi antara fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi. Secara praktis, sintesis ini menekankan pentingnya penguatan landasan institusional melalui pemahaman bersama terhadap fakta-fakta yang dikonstruksi berdasarkan ketentuan Syariah, pengembangan standar dan sistem yang sesuai dengan karakteristik transaksi Islam, pembentukan perilaku pelaku akuntansi yang berlandaskan nilai keislaman, serta perluasan komunikasi informasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sintesis yang dikembangkan masih berada pada tingkat konseptual dan belum diuji secara empiris dalam berbagai praktik akuntansi Islam. Pembahasan empat dimensi konstruktivisme pragmatis juga belum sepenuhnya menguraikan bagaimana hubungan antardimensi tersebut berlangsung dalam konteks kelembagaan dan karakteristik entitas yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengujian empiris terhadap kerangka konseptual ini pada berbagai institusi, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat, dan lembaga pengelola wakaf. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi fakta, kemungkinan, nilai, dan komunikasi memengaruhi kualitas praktik akuntansi, perilaku pelaku, serta pertanggungjawaban entitas dalam mewujudkan tujuan akuntansi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Exploring the nexus between Islamic financial institutions Shariah compliance disclosure and corporate governance: New insights from a cross-country analysis. International Journal of Finance & Economics, 29(4), 4590–4612. https://doi.org/10.1002/ijfe.2891

Abojeib, M., Mahaini, M. G., & Alchaar, M. O. (2023). An analysis of zakat disclosure in Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0123

Ahmed, M. U., Sabirzyanov, R., & Rosman, R. (2016). A critique on accounting for murabaha contract. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), 190–201. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0041

Alam, M. S. (2022). 30 years of research in Islamic accounting: a literature review. *PSU Research Review*. https://doi.org/10.1108/prr-05-2021-0024

Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. M. (2022). Islamic accounting research between 1982 and 2020: A hybrid review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1176–1196. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0132

Amran, A., Fauzi, H., Purwanto, Y., Darus, F., Yusoff, H., Zain, M. M., Abang Naim, D. M., & Nejati, M. (2017). Social responsibility disclosure in Islamic banks: A comparative study of Indonesia and Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 15(1), 99–115. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2015-0016

Andrianto, A., Syah, I., & Wibowo, T. (2026). Behavior Based Conceptual Model of Sharia Accounting Model: Integrating, Ethics, Intention and Sharia Compliance. *Journal of Accounting Science*. https://doi.org/10.21070/jas.v10i1.2048

Autioniemi, J., & Jalonen, H. (2025). Resilience Through Collaboration? Emerging Tensions and Paradoxes in Crisis Management. *Public Performance & Management Review, 48*, 705 - 733. https://doi.org/10.1080/15309576.2025.2466213

Aziz, M. A., & Ahmad, F. A. (2018). The Delineation of the Islamic Accounting Concepts through the Narrative Reviews Intrepretation. *The Journal of Social Sciences Research*. https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.348.352

Basri, H., Siti-Nabiha, A. K., & Abd. Majid, M. S. (2026). Accounting and accountability in religious organizations: An Islamic contemporary scholars' perspective. Gadjah Mada International Journal of Business, 18(2). https://doi.org/10.22146/gamaijb.v18i2.15553

Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. Abacus, 36(1), 71–90. https://doi.org/10.1111/1467-6281.00054

Caniago, I., Yuliansyah, Y., Dewi, F. G., & Komalasari, A. (2023). Islamic work ethic in behavioral accounting. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1281–1299. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0152

Edgina, I. M., & Hamid, A. (2025). Navigating accountability and sustainability in accounting through the lens of Islamic ethics. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 12(2). https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.318

Glavå, G. (2025). The Governing Dynamics of Social Reality: A Unified Theory. *Journal for the Theory of Social Behaviour*. https://doi.org/10.1111/jtsb.70009

Hage, J. (2022). Constructivist Facts as the Bridge Between Is and Ought. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 36*, 53-81. https://doi.org/10.1007/s11196-022-09896-4

Haniffa, R. M., & Hudaib, M. A. (2002). *A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting* [Accepted manuscript].

Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2019). A contemporary review of Islamic finance and accounting literature. *The Singapore Economic Review*. https://doi.org/10.1142/S0217590819420013

Johnson-Laird, P., & Ragni, M. (2019). Possibilities as the foundation of reasoning.. *Cognition, 193*, 103950 . https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.04.019

Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., & Masruki, R. (2024). Challenges and prospects in waqf reporting practices in Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 22(3), 752–765. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2022-0018

Kamla, R. (2009). Critical insights into contemporary Islamic accounting. Critical Perspectives on Accounting, 20(8), 921–932. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002

Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. Abacus, 42(2), 266–289. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x

Mahyudin, M., Sugianto, S., & Majid, M. (2025). Implementation of Islamic Accounting in Supporting Islamic Economic Principles: A Systematic Literature Review (SLR). *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*. https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i2.6675

Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2023). Sharia Accounting Model in the Perspective of Financial Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176

Moussa, M. A., & Yilmaz, R. (2026). Towards an interest-free zakat calculation model: Integrating Sharia principles in balance sheet and income statement. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17(8), 4296–4323. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2024-0263

Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Suryarini, T., & Hapsoro, B. B. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure—a study on Islamic banks in Indonesia. Cogent Business & Management. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151

Napier, C. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. Accounting History, 14(1–2), 121–144. https://doi.org/10.1177/1032373208098555

Nursanty, I. A., Lestari, B. A. H., Jumaidi, L. T., Wardani, R., & Prathama, B. D. (2026). Towards an Islamic spirituality-based framework for public accountants' ethics. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 10(2). https://doi.org/10.29303/jaa.v10i2.720

Nørreklit, H. (2017). A philosophy of management accounting : a pragmatic constructivist approach. https://doi.org/10.4324/9781315680736

Nørreklit, H., Nørreklit, L., & Mitchell, F. (2010). Towards a paradigmatic foundation of accounting practice. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(6), 733–758. https://doi.org/10.1108/09513571011065844

Nørreklit, H., Raffnsøe-Møller, M., & Mitchell, F. (2016). A pragmatic constructivist approach to accounting practice and research. Qualitative Research in Accounting & Management, 13(3), 266–277. https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2016-0039

Nørreklit, L. (2020). A Pragmatic Constructivist Perspective on Language Games. 11-28. https://doi.org/10.7146/propracon.v10i1.119252

Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(4), 349–364. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035

Osberg, G., Schulz, F., & Bretter, C. (2024). Navigating sustainable futures: The role of terminal and instrumental values. *Ecological Economics*. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108325

Russo-Netzer, P., & Atad, O. I. (2024). Activating values intervention: an integrative pathway to well-being. *Frontiers in Psychology, 15*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1375237

Salleh, M. F. M., Ahmad, A., Basnan, N., Harun, A. M., Wahid, H., & Abdul Wahab, A. B. (2017). Disclosure of non-financial information in discharging accountability of waqf trustee. IPN Journal, 7(1), 15–28. https://doi.org/10.58458/ipnj.v07.01.02.0046

Shafii, Z., & Abdul Rahman, A. R. (2016). Issues on the application of IFRS 9 and fair value measurement for Islamic financial instruments. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), 202–214. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0031

Smit, J. P., Buekens, F., & du Plessis, S. (2011). What is money? An alternative to Searle's institutional facts. Economics and Philosophy, 27(1), 1–22. https://doi.org/10.1017/S0266267110000441

Sunarno, R. D. (2024). Refleksi Filosofis atas Kajian Teori dan Praktik Akuntansi Syariah. *Owner*. https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2259

Wahyuni, I. S., Fernando, Y., & Hasnita, E. (2018). Role of Islamic ethics towards ethical accounting practice. Journal of Governance and Integrity, 2(1). https://doi.org/10.15282/jgi.2.1.2018.5535